

Determinan Tingkat Internet *Financial Reporting*: Total Aset, Aksesibilitas, dan Opini Audit di Provinsi Jambi

Andi Syahira Maharani¹, Rosmeli², Jaya Kusuma Edy³

^{1,2,3}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: Andisyahira08@gmail.com¹, Rosmeli@unja.ac.id², jaykused@unja.ac.id³

Article History:

Received: 08 Juni 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 21 Juni 2026

Keywords:

Pelaporan

Keuangan Internet, Aset

Pemerintah Daerah,

Aksesibilitas Internet, Opini

Audit, Provinsi Jambi

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh total aset pemerintah daerah, aksesibilitas internet, dan opini audit terhadap tingkat Internet Financial Reporting (IFR) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data panel 11 kabupaten/kota periode 2019-2024 yang dianalisis dengan EViews menggunakan model Random Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap IFR. Secara parsial, aksesibilitas internet berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan total aset dan opini audit tidak berpengaruh signifikan. Koefisien determinasi menunjukkan ketiga variabel mampu menjelaskan 31,68 persen variasi IFR. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aksesibilitas infrastruktur internet merupakan pendorong utama transparansi keuangan digital pemerintah daerah, sementara besaran aset dan opini WTP tidak otomatis mendorong publikasi laporan keuangan di situs resmi.

PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 mendorong transformasi digital di sektor publik, termasuk dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Internet Financial Reporting (IFR) merupakan praktik penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Prihartono, 2023). Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan seluruh badan publik menjamin aksesibilitas informasi keuangan kepada masyarakat. Namun, implementasi IFR di tingkat pemerintah daerah Indonesia masih sangat bervariasi (Diptyana & Rokhmania, 2018) menemukan bahwa meskipun hampir semua pemerintah provinsi memiliki situs web, hanya sebagian kecil yang secara konsisten mengunggah laporan keuangan secara lengkap.

Provinsi Jambi mencerminkan ketimpangan serupa. Selama periode 2019–2024, tingkat penetrasi internet di provinsi ini melonjak dari 32,8 persen menjadi 85,91 persen, namun skor IFR antar kabupaten/kota tidak mengikuti pola linier. Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi mencapai skor tinggi (>0,8), sementara Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, dan Tanjung Jabung Barat memiliki skor sangat rendah, bahkan ada yang tidak pernah mengunggah laporan keuangan selama beberapa tahun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transparansi digital tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur internet, tetapi juga oleh faktor-faktor spesifik daerah.

Setidaknya tiga faktor utama diduga memengaruhi tingkat IFR: total aset pemerintah daerah, aksesibilitas internet, dan opini audit. Total aset mencerminkan kapasitas fiskal dan ukuran organisasi. Berdasarkan Agency Theory, pemerintah daerah sebagai agen berkewajiban mengurangi asimetri informasi dengan menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses. Daerah dengan aset besar secara teoritis memiliki sumber daya lebih untuk mengembangkan IFR. Namun, bukti empiris tidak konsisten. (Hardiningsih *et al.*, 2021) menemukan pengaruh signifikan, sementara Moehardiono dan (Moehardiono & Yuliati, 2021) serta (Hadianto & Murtin, 2020) melaporkan sebaliknya. Di Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan total aset tertinggi (Rp5.015,89 miliar) justru memiliki skor IFR rendah (0,236), sedangkan Sarolangun dengan aset lebih rendah (Rp2.490,38 miliar) mencapai skor tinggi (0,917). Hal ini menunjukkan hubungan yang tidak otomatis.

Aksesibilitas internet, diukur dengan tingkat penetrasi, merupakan prasyarat teknis bagi IFR. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa semakin tinggi penetrasi internet di masyarakat, semakin kuat tekanan normatif bagi pemerintah untuk menyediakan informasi daring, karena publik memiliki kemampuan mengakses. Studi (Samsiyah *et al.*, 2018) dan (Elisa, 2017) menegaskan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap layanan digital pemerintah.

Opini audit yang dikeluarkan BPK, terutama predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mencerminkan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pemerintah yang memperoleh opini WTP memiliki insentif reputasional untuk lebih transparan, termasuk melalui IFR. Namun, hasil penelitian sebelumnya juga beragam: (Hardiningsih *et al.*, 2021) menemukan pengaruh signifikan, sementara (Sarumaha *et al.*, 2024) melaporkan tidak signifikan. Di Provinsi Jambi, meskipun seluruh kabupaten/kota meraih opini WTP pada 2023–2024, skor IFR tetap sangat bervariasi. Muaro Jambi yang konsisten WTP justru memiliki skor IFR terendah, mengindikasikan bahwa opini baik belum otomatis mendorong praktik IFR.

Ketidakkonsistenan temuan sebelumnya menunjukkan adanya *research gap*, terutama karena penelitian tentang determinan IFR di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Karakteristik fiskal, geografis, dan infrastruktur digital di Jambi berbeda dengan wilayah lain seperti Jawa atau Sumatera Barat, sehingga diperlukan bukti empiris yang kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan perkembangan total aset, aksesibilitas internet, opini audit, dan tingkat IFR pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019–2024; (2) menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap IFR secara parsial dan simultan. Hipotesis yang diajukan adalah: total aset berpengaruh positif terhadap IFR; aksesibilitas internet berpengaruh positif terhadap IFR; opini audit berpengaruh positif terhadap IFR; dan ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IFR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal yang bertujuan menguji pengaruh total aset pemerintah daerah, aksesibilitas internet, dan opini audit terhadap tingkat *Internet Financial Reporting* (IFR). Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang berjumlah 11 daerah. Karena jumlah populasi terbatas dan seluruhnya memenuhi kriteria, penelitian ini menggunakan metode sensus sehingga tidak ada teknik sampling.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk panel, yang menggabungkan dimensi *time series* (tahun 2019–2024) dan *cross-section* (11 kabupaten/kota). Sumber data berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), laporan hasil pemeriksaan BPK, data tingkat penetrasi internet dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), serta hasil observasi langsung pada situs web resmi masing-masing pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran daring (*online observation*).

Definisi operasional variabel adalah sebagai berikut. Variabel dependen adalah tingkat IFR yang diukur menggunakan indeks skor berdasarkan tiga komponen: ketersediaan delapan jenis dokumen keuangan (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK, APBD), kemudahan akses (menu khusus, jumlah klik ≤ 3 , tautan unduh berfungsi), serta format PDF interaktif. Skor total maksimum 12 kemudian dikonversi ke rentang 0–1. Total aset pemerintah daerah sebagai variabel independen diambil dari nilai neraca pada LKPD dan ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural untuk menormalkan distribusi. Aksesibilitas internet diukur dengan persentase tingkat penetrasi internet di Provinsi Jambi yang berlaku sama untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu periode waktu. Opini audit dikodekan secara dikotomi: 1 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 0 untuk selain WTP (WDP, TW, atau TMP). Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Model regresi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$IFR_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LOGTA}_{it} + \beta_2 \text{AI}_{it} + \beta_3 \text{OA}_{it} + u_{it}$$

di mana IFR adalah tingkat *Internet Financial Reporting*, LOGTA adalah logaritma total aset, AI adalah aksesibilitas internet (penetrasi), OA adalah opini audit, β_0 adalah intersep, β_1 – β_3 adalah koefisien regresi, dan u_{it} adalah komponen error. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui tiga tahap uji: Uji Chow untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), Uji Hausman untuk memilih antara FEM dan *Random Effect Model* (REM), serta Uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara CEM dan REM. Setelah model terpilih, dilakukan uji asumsi klasik (normalitas residual, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) serta uji hipotesis yang meliputi uji simultan (F), uji parsial (t), dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Internet Financial Reporting (IFR)

Internet Financial Reporting (IFR) diukur melalui observasi langsung pada *website* resmi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019–2024. Indeks IFR mencakup ketersediaan delapan dokumen keuangan (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK, APBD), kemudahan akses (menu khusus, ≤ 3 klik, tautan unduh berfungsi), dan format PDF *searchable*. Skor maksimal 12 dikonversi ke rentang 0–1. Semakin tinggi skor, semakin baik transparansi digital.

Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata IFR Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Tahun	Rata-Rata IFR	Kategori
2019	0,3182	Rendah
2020	0,3561	Rendah
2021	0,4242	Sedang
2022	0,4394	Sedang
2023	0,7348	Tinggi
2024	0,8864	Sangat Tinggi

Sumber: Website resmi pemerintah daerah (diakses 2026)

Rata-rata IFR meningkat signifikan, terutama pada 2023–2024. Kabupaten Sarolangun tertinggi (0,9167), diikuti Kota Jambi (0,8472) dan Tanjung Jabung Timur (0,8194). Sebaliknya,

Kabupaten Muaro Jambi terendah (0,2222), diikuti Merangin (0,2361) dan Tanjung Jabung Barat (0,2361). Ketimpangan implementasi IFR masih tinggi.

Perkembangan Total Aset Pemerintah Daerah

Total aset mencerminkan kapasitas fiskal dan ukuran organisasi sektor publik. Data berasal dari neraca LKPD yang telah diaudit BPK.

Tabel 2. Perkembangan Rata-Rata Total Aset (dalam miliar rupiah)

Tahun	Rata-Rata Total Aset	Pertumbuhan (%)
2019	2.401,17	-
2020	2.380,14	-0,88
2021	2.603,95	9,40
2022	2.727,00	4,73
2023	2.842,53	4,24
2024	2.937,97	3,36

Sumber: LHP atas LKPD yang telah diaudit BPK (diolah peneliti)

Rata-rata total aset tumbuh 22,36% selama periode. Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertinggi (Rp5.015,89 miliar), disusul Kota Jambi (Rp4.348,36 miliar). Kota Sungai Penuh terendah (Rp1.620,50 miliar).

Perkembangan Aksesibilitas Internet

Aksesibilitas diukur dengan tingkat penetrasi internet dari APJII. Mengacu pada pendekatan (Hardiningsih *et al.*, 2021) tingkat penetrasi diterapkan sama untuk setiap kabupaten/kota dalam satu provinsi karena data hingga tingkat kabupaten tidak tersedia secara rinci.

Tabel 3. Perkembangan Penetrasi Internet di Provinsi Jambi

Tahun	Penetrasi (%)	Kenaikan (poin)
2019	32,80	-
2020	41,00	8,20
2021	56,00	15,00
2022	70,70	14,70
2023	80,46	9,76
2024	85,91	5,45

Sumber: APJII (2024)

Penetrasi internet meningkat pesat dari 32,80% menjadi 85,91%, menciptakan tekanan normatif bagi pemerintah untuk menyediakan informasi daring.

Perkembangan Opini Audit

Opini audit diperoleh dari LHP BPK. Dikodekan: 1 = WTP, 0 = selain WTP.

Tabel 4. Perkembangan Opini Audit (Persentase WTP)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% WTP	100	90,91	100	90,91	100	100

Sumber: LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi (diolah peneliti)

Mayoritas daerah meraih WTP, namun capaian ini tidak otomatis mendorong IFR.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tiga uji dilakukan untuk memilih model terbaik antara CEM, FEM, dan REM.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.343881	(10,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	46.654545	10	0.0000

Sumber: Output EViews 13 (diolah)

Nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang lebih tepat berdasarkan Uji Chow adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0	3	1

Sumber: Output EViews 13 (diolah)

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 1,0000 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier (*Breusch-Pagan*)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	27.180233	0.072281	27.252514
	(0.0000)	(0.7880)	(0.0000)

Sumber: Output EViews 13 (diolah)

Berdasarkan uji Lagrange Multiplier, nilai *probabilitas Both* adalah 0,0000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Keputusan ini konsisten dengan hasil uji Hausman.

Dari ketiga uji pemilihan model, diperoleh keputusan yang konsisten bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan model terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Estimasi Regresi dan Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.072391	6.358838	-0.168646	0.866624
LOGTA	0.034853	0.225137	0.154808	0.877476
PENETRASI	0.009363	0.001844	5.078209	0.000004
OPINI	0.032769	0.206253	0.158876	0.874283
R-squared	0.348331	Mean dependent var		0.204531
Adjusted R-squared	0.316799	S.D. dependent var		0.318649
S.E. of regression	0.263383	Sum squared resid		4.300965
F-statistic	11.046782	Durbin-Watson stat		1.728764
Prob(F-statistic)	0.000007			

Unweighted Statistics			
R-squared	0.232913	Mean dependent var	7.545292
Sum squared resid	7.545292	Durbin-Watson stat	0.526506

Sumber: Output EViews 13 (diolah)

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$IFR_{it} = -1,0724 - 0,03485LOGTA_{it} + 0,009363AI_{it} + 0,03277OA_{it} + u_{it}$$

Koefisien Determinasi

Adjusted $R^2 = 0,3168$ berarti ketiga variabel independen hanya mampu menjelaskan 31,68% variasi IFR. Sisanya sebesar 68,32% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti kualitas SDM aparatur, komitmen kepala daerah, alokasi anggaran teknologi informasi, dan kualitas infrastruktur *website*.

Uji Parsial (t)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR (koefisien 0,03485; $p=0,8775$), sejalan dengan (Moehardiono & Yuliati, 2021) dan (Hadianto & Murtin, 2020), yang mengindikasikan bahwa besarnya aset tidak otomatis dialokasikan untuk digitalisasi laporan keuangan. Sebaliknya, aksesibilitas internet berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,009363; $p=0,0000$), di mana setiap kenaikan 1% penetrasi internet meningkatkan skor IFR sebesar 0,00936 poin, mendukung temuan (Samsiyah *et al.*, 2018) dan (Elisa, 2017) serta menegaskan peran penting penetrasi internet sebagai pendorong utama transparansi digital. Sementara itu, opini audit juga tidak berpengaruh signifikan (koefisien 0,03277; $p=0,8743$), berbeda dengan (Hardiningsih *et al.*, 2021) namun sejalan dengan (Sarumaha *et al.*, 2024), menunjukkan bahwa opini WTP yang baik belum cukup mendorong publikasi laporan keuangan secara daring.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa aksesibilitas internet merupakan faktor kunci dalam mendorong IFR. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan perluasan infrastruktur digital, mereorientasi belanja modal ke pengembangan *website* dan SIKD, serta menerbitkan peraturan yang mewajibkan publikasi laporan keuangan lengkap secara daring. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti kualitas SDM, komitmen kepala daerah, dan anggaran teknologi informasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh total aset, aksesibilitas internet, dan opini audit terhadap tingkat *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019–2024. Secara deskriptif, IFR menunjukkan peningkatan signifikan dari 0,318 menjadi 0,886, terutama pada 2023–2024, meskipun ketimpangan antar daerah masih tinggi. Total aset tumbuh 22,36%, aksesibilitas internet melonjak dari 32,80% menjadi 85,91%, dan opini audit didominasi predikat WTP sepanjang periode.

Berdasarkan estimasi *Random Effect Model* (REM), secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap IFR. Namun secara parsial, hanya aksesibilitas internet yang berpengaruh positif dan signifikan ($p=0,0000$), sementara total aset ($p=0,8775$) dan opini audit ($p=0,8743$) tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya aset daerah

belum tentu dialokasikan untuk digitalisasi laporan keuangan, dan capaian opini WTP tidak otomatis mendorong publikasi daring. Ketiga variabel hanya menjelaskan 31,68% variasi IFR, sisanya dipengaruhi faktor lain seperti kualitas SDM dan komitmen kepala daerah.

Pemerintah Provinsi Jambi perlu menerbitkan peraturan gubernur tentang standar minimal publikasi laporan keuangan berbasis *website*, mencakup menu khusus, akses maksimal tiga klik, tautan unduh berfungsi, serta kelengkapan delapan jenis dokumen LKPD. Provinsi juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi tahunan, memberikan pendampingan teknis intensif bagi daerah dengan skor IFR rendah (Muaro Jambi, Merangin, Tanjung Jabung Barat), serta memfasilitasi percepatan infrastruktur digital di daerah tertinggal melalui kerja sama dengan penyedia telekomunikasi dan alokasi dana khusus.

Pemerintah kabupaten/kota disarankan mengalokasikan minimal 5–10% belanja modal untuk pengembangan *website* dan sistem informasi keuangan daerah, serta menerbitkan peraturan bupati/walikota yang mewajibkan unggah laporan keuangan lengkap setiap tahun dalam format PDF interaktif. Daerah dengan IFR rendah segera memperbaiki ketersediaan menu dan tautan unduh, sementara daerah dengan IFR tinggi (Sarolangun, Kota Jambi) perlu mempertahankan kualitas dan menambah fitur pencarian dokumen serta memastikan ketepatan waktu unggah.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A., Putra, A., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh ukuran pemerintah, pendapatan per kapita, dan leverage terhadap keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah (Studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 1–15.
- Amaliyah Masra, E., & Fitria Sari, V. (2020). Faktor yang memengaruhi internet financial reporting (IFR) pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 1–12.
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203–214.
- Dilliana, S. M., & Henrikus, H. (2022). *Manajemen keuangan daerah*. CV Eureka Media Aksara.
- Diptyana, P., & Rokhmania, A. (2018). Exploring government internet financial reporting in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 115–138.
- Elisa, N. (2017). Usability, accessibility and web security assessment of e-government websites in Tanzania. *International Journal of Computer Applications*, 164(5), 1–7.
- Enas, U., Moeljono, M., Zunaidi, A., Pribadi, Y., Syairozi, M. I., Uliansyah, B. A. A., Sunyoto, E., Sijabat, R., Sarasi, V., & Hartoto, H. (2021). *Keuangan negara*. CV Widina Media Utama.
- Alonge, E. O., Dudu, O. F., & Alao, O. B. (2024). The impact of digital transformation on financial reporting and accountability in emerging markets. *International Journal of Science and Technology Research Archive*, 7(2), 25–49.
- Goddard, A., & Assad, M. J. (2006). Accounting and navigating legitimacy in Tanzanian NGOs. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 19(3), 377–404.
- Hadianto, D., & Murtin, A. (2020). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan internet financial reporting (IFR) di Indonesia. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 33–45.
- Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan digital di Indonesia (Studi kasus di Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Pekommas*, 17(2), 81–90.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi keuangan daerah* (Ed. ke-3). Salemba Empat.
- Hardani, H., Ustiawaty, J., Sukmana, D. J., et al. (2020). *Metode penelitian kualitatif dan*

- kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., Jannah, A., & Haryanto, M. Y. D. (2021). Digitalisasi publikasi laporan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 19(1), 132–146.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karso, A. J. (2022). *Buku ajar good governance*. Samudra Biru.
- Kurniati, S., & Siddi, P. (2020). Pengaruh kekayaan daerah, jenis pemerintahan, dan kualitas audit terhadap pengungkapan internet-based financial reporting. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–15.
- Kurniawan, C. H., & Scorpianti, L. N. K. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan keteraksasan internet financial reporting oleh pemerintah daerah di Indonesia. *Modus*, 31(2), 184–206.
- Kurniawan, Y. J., Sjahrudin, H., Nuraeni, S. E., Swaputra, I. B., Astakoni, D. R. S. I., Hakim, L., Totong, A. J., & Arini, D. U. (2023). *Digitalisasi manajemen keuangan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kusumaningtyas, E., Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., & Syah, S. (2022). *Konsep dan praktik ekonometrika menggunakan EViews* (Vol. 1). Academia Publication.
- Lalević Filipović, A., Martić, V., & Demirović, S. (2018). Digitalization of financial reporting in local governments of three Montenegrin regions: Current situation and perspectives. *Management*, 23(1), 59–79.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 49–55.
- Lukman, J. P., & Sakir, A. R. (2024). Transformasi digital dalam administrasi publik: Peluang dan tantangan. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(1), 1042–1049.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Moehardiono, I. A., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan opini audit terhadap internet financial reporting pemerintah kota/kabupaten Jawa Timur. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 717–727.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 89–104.
- Prasasti, A. M., Rahayu, S., & Zultilisna, D. (2017). Opini audit, tingkat kemandirian, dan tipe pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(2), 94–103.
- Prihartono, D. (2023). Penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2), 192–201.
- Purba, R. B. (2023). *Teori akuntansi: Sebuah pemahaman untuk mendukung penelitian di bidang akuntansi*. Merdeka Kreasi Group.
- Rahmawati, R. A., & Mahmud, A. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 1–10.
- Rizkiyaningsih, W., & Rusmana, O. (2017). Determinants of internet financial reporting in Indonesian local governments. *Jurnal SAR (Soedirman Accounting Review)*, 2(1), 1–20.
- Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh temuan audit, rekomendasi hasil pemeriksaan, dan ukuran pemerintahan daerah terhadap opini audit pada pemerintah daerah di Indonesia. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), 38–45.

- Samsiyah, N., Riharjo, I. B., & Handayani, N. (2018). Determinan aksesibilitas internet financial reporting (IFR) (Studi empiris pada IFR pemerintah daerah Pulau Jawa). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(12), 1–15.
- Sarumaha, A. Y., Andriani, W., Mustika, R., & Zahara, Z. (2024). Pengaruh pendapatan per kapita, belanja daerah, dan opini audit terhadap aksesibilitas internet financial reporting pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1881–1890.
- Sihombing, P. R. (2022). *Aplikasi EViews untuk statistisi pemula*. PT Dewangga Energi Internasional.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of U.S. municipalities on the internet. *Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92.
- Ujianto, H., Moehaditoyo, S. H., & Amin, H. M. (2017). *Kuangan negara dilengkapi tax amnesty dilampiri APBN 2015–2016*. Penerbit Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Wahyuni, F., & Pangestu, A. A. (2024). Factors influencing internet financial reporting quality: Audit opinion as a moderator. *Jurnal Ekonomi*, 13(2), 1–15.
- Yuliani, N. (2017). Pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas, dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 24(1), 1–14.
- Yuniarwati, Y., Ardana, C., & Dewi, S. P. (2022). Theory of planned behavior for predicting fraudulent financial reporting intentions. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 650, 529–537.
- Yunita, E. A. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi publikasi informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah se-Jawa Tengah. *Dialektika*, 6(1), 1–15.